

## SEJARAH KERAJAAN SEBA PADA MASA PEMERINTAHAN RAJA LAZARUS ROHI TAHUN 1881-1890

Devrianti Higa<sup>1)</sup>, Andreas Ande<sup>2)</sup>, Susilo Setyo Utomo<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Afiliasi (Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang, Jln. Adisucipto Penfui Kupang, 85001, NTT, Telp (0380) 88639 Fax.661642, Indonesia)

\* [devrianhiga@gmail.com](mailto:devrianhiga@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengungkapkan Sejarah Kerajaan Seba Pada Masa Pemerintahan Raja Lazarus Rohi Tahun 1881-1890, (2) Untuk mengungkapkan Stratifikasi Sosial Pada Masa Pemerintahan Raja Lazarus Rohi Tahun 1881-1890. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode sejarah yakni heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Kerajaan Seba merupakan salah satu kerajaan yang pernah ada di wilayah Kabupaten Sabu Raijua dengan wilayah kekuasaan paling luas yakni meliputi 18 wilayah ketemukungan. Sistem pemerintahan ini terus bertahan hingga Tahun 1963. (2) peranan dan status sosial pada masyarakat Mebba/Seba didasarkan pada struktur pemerintahan Adat yang telah diatur yang merupakan nilai budaya daerah yang kecenderungan setiap keturunan (*Kololoro*) mempunyai fungsi dan perannya masing-masing sesuai dengan tingkatan atau golongannya yang mengedepankan harga diri sebagai pandangan hidup masyarakat Mebba/Seba.

**Kata Kunci: Sejarah, Kerajaan, Pemerintahan**

### Abstract

*The purpose of this study is to (1) reveal the history of the Seba Kingdom during the reign of King Lazarus Rohi in 1881-1890, (2) To reveal the social stratification during the reign of King Lazarus Rohi in 1881-1890. Data analysis used in this study using historical methods, namely heuristics, verification, interpretation and historiography. The results of the study show that, (1) the Seba Kingdom is one of the kingdoms that once existed in the Sabu Raijua Regency area with the widest area of power, namely covering 18 Temukungan areas. This government system continued to survive until 1963. (2) the role and social status of the Mebba/Seba community is based on the structure of the customary government that has been regulated which is a regional cultural value where each descendant (*Kololoro*) tends to have their respective functions and roles according to their level or group which prioritizes self-esteem as the way of life of the Mebba/Seba community.*

**Keywords: History, Kingdom, Government**

## **PENDAHULUAN**

Kerajaan di Nusa Tenggara Timur pada mulanya dibentuk dengan tujuan sebagai suatu benteng pertahanan masyarakat setempat. Pada masa sebelum kedatangan Belanda, masyarakat telah hidup teratur dalam sistem kekeluargaan yang berwujud suku serta lahir dan berkembang kerajaan-kerajaan yang masih berdaulat dan bebas dari campur tangan asing (Widiyatmika, 2007:12). Suku di Nusa Tenggara Timur menentukan jati dirinya dengan kondisi lingkungan yang gersang dan bergunung-gunung.

Pemerintahan Hindia Belanda dan Portugis menjadi bangsa yang berpengaruh terhadap terbentuknya kerajaan-kerajaan kecil di Nusa Tenggara Timur. Salah satunya terjadi persaingan perebutan kekuasaan antara VOC dengan Portugis yang akhirnya membagi beberapa kerajaan di Nusa Tenggara Timur. Kerajaan-kerajaan yang ada di Nusa Tenggara Timur pada masa sesudah Tahun 1900, telah berubah status menjadi swapraja.

VOC dan Portugis juga tiba di Pulau Sabu yang pada saat itu masyarakatnya sedang mengembangkan diri dan tetap berpedoman pada kebijaksanaan hidup yang mengacu pada konsep agama suku, walaupun mereka sudah tersebar dalam 6

swapraja dan di masing-masing swapraja diperintah oleh seorang raja. VOC menginginkan agar kepulauan Sabu diperintah hanya oleh seorang raja saja. Untuk mewujudkan niatnya itu maka dijalankan politik *Divide et Impera*, (Kaho, 2005:21).

Seiring berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdampak besar bagi pengetahuan seseorang. Salah satunya membuat sebagian orang lupa akan sejarah daerahnya. Untuk menghindari hal tersebut maka dilakukan penelitian untuk mengkaji kembali tentang sejarah di daerah-daerah dan membuat orang sadar akan apa yang terjadi di masa lalu. Di zaman modern sekarang ini setelah adanya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia membuat generasi muda di Pulau Sabu tidak lagi mengetahui dengan jelas Sejarah Kerajaan Seba pada Masa Pemerintahan Raja Lazarus Rohi..

## **METODE**

Metode penelitian adalah langkah dan cara ilmiah dalam mencari, merumuskan, menggali, menganalisis, membahas dan menyimpulkan data penelitian untuk mencapai tujuan tertentu. pada bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, informan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Historis (metode penelitian sejarah). Penelitian historis yaitu metode atau cara yang digunakan peneliti untuk mengkaji peristiwa-peristiwa serta fakta-fakta masa lampau (Suprpto 2013:13). Jenis penelitian historis bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini diseluruh wilayah bekas Kerajaan Seba yang dipusatkan di kelurahan Mebba yang merupakan ibukota dari Kerajaan Seba. Pemilihan lokasi ini atas pertimbangan bahwa informan yang dapat memberikan data yang akurat berkaitan dengan masalah penelitian berada di sekitar Kerajaan Seba.

#### **C. Informan**

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi ia harus memiliki pengalaman tentang latar penelitian (Sugiono 2009:99). Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu penentuan informan dilakukan berdasarkan pertimbangan peneliti. Menurut (Sugiono 2012:54) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber

data dengan pertimbangan tertentu. Orang-orang yang dijadikan informan adalah tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap lebih mengetahui sejarah Kerajaan Seba sebelum masa pemerintahan Raja Lazarus Rohi 1881. Dalam penentuan informan, dapat dilihat dari pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan masalah penelitian, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek penelitian.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data menjadi penunjang dalam suatu penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sumber data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari orang yang mengalami, melakukan menyaksikan peristiwa sejarah (Basri 2006:31). Pada penelitian ini Sumber data primer di peroleh dari wawancara dan observasi langsung di Kerajaan Seba.

##### **2. Data Sekunder**

Margono (2005:23) mengatakan bahwa sumber data sekunder di peroleh dari siapapun yang merupakan saksi yang tidak terlibat langsung yakni orang yang dapat memberikan keterangan atau data pelengkap

sebagai bahan pembanding. Sumber data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari informan tangan kedua dari buku-buku, arsip-arsip atau dokumen yang relevan dengan masalah penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono 2012:224). Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan studi dokumen.

##### **1. Studi Dokumen**

Margono (2005:181) menyatakan studi dokumen merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip atau dokumen, foto-foto dan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan mencari dan mengkaji arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang dibuat pada masa pemerintahan raja Lazarus Rohi.

##### **2. Observasi**

Observasi adalah mencurahkan segala alat indera terutama pengamatan untuk mengamati fokus objek yang diselidiki

(Basri 2006:58). Dalam penelitian ini peneliti nanti akan mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Seba.

##### **3. Wawancara**

Iskandar (2008:178) menyatakan bahwa wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara tatap muka. Wawancara yang nanti akan digunakan untuk penelitian ini adalah wawancara yang bersifat terbuka dan mendalam yang dilakukan dalam suasana keakraban dan kekeluargaan. Untuk mempermudah wawancara di siapkan daftar pertanyaan dan alat-alat bantu wawancara seperti alat perekam, handphone, kamera dan sebagainya.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis sejarah. Menurut Hamid dan Madjid (2014:43) metode sejarah merupakan cara atau teknik dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau, melalui empat tahapan kerja, yaitu:

##### **1. Heuristik (pengumpulan sumber)**

Kuntowijoyo (2001:89) mengatakan pada tahap akan menggunakan studi kepustakaan yaitu upaya yang dilakukan untuk memperoleh bahan kajian penelitian. Fakta tersebut diperoleh dari buku-buku,

artikel, dokumen-dokumen lainnya. Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan jejak-jejak atau sumber sejarah yang masih tertinggal yang terkait dengan objek penelitian.

## 2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Setelah sumber sejarah dalam berbagai kategorinya itu sudah terkumpul, tahap yang berikutnya verifikasi yaitu dimana dapat menguji kebenaran tentang keaslian sumber yang dilakukan melalui kritik interen. Kritik sejarah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kritik eksternal dan kritik internal. Kritik Eksteral digunakan untuk menilai otentitas atau keaslian sumber sejarah, apakah asli atau palsu. Setelah terbukti asli maka akan dilakukan kritik Internal untuk menilai kredibilitas data dalam sumber, apakah isi dokumen dapat dipercaya atau tidak.

## 3. Interpretasi

Interprestasi adalah kegiatan untuk mengusut hubungan antara fakta lainnya secara berkelompok sehingga rangkaian fakta-fakta tersebut memiliki makna. Interpretasi yang digunakan penulis untuk mengetahui kondisi umum yang sebenarnya menggunakan nalar yang kritis agar ditemukan kesimpulan atau gambaran sejarah yang ilmiah.

## 4. Historiografi

Setelah selesai interprestasi, langkah selanjutnya adalah historiografi, yaitu menuliskan cerita sejarah. Cerita sejarah ditulis dalam 2 bentuk yaitu: (1) penulisan sejarah secara naratif yaitu menuliskan cerita sejarah yang mengkaji sebab akibat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Dalam penulisan ini peneliti akan menggunakan penulisan sejarah secara naratif. Peneliti akan menyajikan peristiwa sejarah secara berurutan sesuai waktu terjadinya.

## **PEMBAHASAN**

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Hasil dari penelitian merupakan proses mengolah data dan informasi secara baik terkait penelitian berdasarkan fakta guna memecahkan persoalan sehingga terbentuklah prinsip-prinsip umum. Hasil penelitian ini berkaitan dengan data-data mentah yang diperoleh dari informan dalam wawancara mendalam. Hasil penelitian ini dapat diuraikan ke dalam 2 rumusan masalah yakni Sejarah Kerajaan Seba pada masa pemerintahan Raja Lazarus Rohi tahun 1881-1890 dan Stratifikasi Sosial pada masa Pemerintahan Raja Lazarus Rohi 1881-1890.

## **1. Sejarah Kerajaan Seba Pada Masa Pemerintahan Raja Lazarus Rohi Tahun 1881-1890**

Setiap kerajaan yang di perintah atau dipimpin Raja pastinya memiliki cerita sejarahnya masing-masing. Begitu juga dengan kerajaan Seba sebelum masa pemerintahan raja Lazarus Rohi Tahun 1881-1890. Kerajaan Seba merupakan Kerajaan yang ada di Pulau Sabu yang memiliki wilayah kekuasaan paling luas dan memiliki sejumlah temukung dan fetor dalam membantu Raja.

Nguru Nape (82: Tokoh Masyarakat) mengatakan pada awalnya Kerajaan Seba bukanlah sebuah Kerajaan melainkan hanya sebuah wilayah atau tanah kekuasaan dari anak *Wai Waka* (generasi) ke-18 dari *Kika Ga* atau generasi ke-13 dari *Ngara Rai*. Pada waktu itu, semua keturunan dari generasi ke-13 sampai ke-18 tinggal di suatu tempat, yakni *Kolo Merabbu*. Hidup berdesak-desakan sudah tentu membawa banyak konsekuensinya. Maka dari itu *Wai Waka* mengambil keputusan untuk membagi kepulauan Sabu dalam beberapa wilayah berdasarkan jumlah anak-anaknya. Kepulauan Sabu dibagi menjadi 6 wilayah sesuai dengan jumlah anak-anak dari *Wai Waka*. Pembagian tersebut yakni, (1) *Dara Rai* mendapat wilayah Habba (Seba) yang menjadi Kerajaan Seba, (2) *Wara Wai* mendapat wilayah Liae, (3) *Laki Wai* mendapat wilayah Dimu (Timur),

(4) *Kole Wai* mendapat wilayah Mehara (mesara), (5) *Di'da Wai* mendapat wilayah Menia, dan (6) *Jaka Wai* mendapat wilayah Raijua. Dengan adanya pembagian wilayah tersebut sehingga terbentuknya suatu rumpun keluarga yang disebut dengan *Udu* yang dikepalai *Bangngu Udu*. Rumpun-rumpun keluarga itu berkembang menjadi beberapa buah rumpun. Maka dalam setiap *Rai* (wilayah) terdapat *Udu*, dan setiap *Udu* terdiri beberapa *Kerogo Udu*. Di wilayah Habba (Seba) yang dipimpin Dara Rai terdapat 5 *Udu*. Dia juga mengatakan, sebelum Wilayah Habba di bentuk menjadi Kerajaan dan diperintah oleh Raja, Wilayah Habba diperintah oleh beberapa kelompok adat yang disebut “Dewan *Mone Ama*”. Di wilayah Habba (Seba) terdapat 9 dewan adat, yakni: (1) *Deo Rai*, (2) *Pulo'do*, (3) *Doheleo*, (4) *Rue*, (5) *Latia*, (6) *Bakka-Pahi*, (7) *Maukia* (8) *Kenuhe*, dan (9) *Tutudalu*. Dewan *Mone Ama* ini yang bertugas memimpin upacara-upacara tertentu yang telah diatur dalam kelender Adat Masyarakat setempat yang perhitungan musimnya menurut peredaran bulan dan matahari.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka disimpulkan bahwa kerajaan seba ada karena semua keturunan Kika Ga mulai dari generasi ke-13 sampai generasi ke-18 tinggal dan hidup bersama di suatu tempat. Mereka hidup berdesak-desakan sehingga

Wai Waka memutuskan untuk membagi Kepulaun Sabu menjadi beberapa bagian sesuai jumlah anaknya.

Agustina Hae (78: Keturunan *Duae/Raja ke XV*), mengatakan untuk mempermudah pemerintahan di wilayah Habba maka sekitar 1690 wilayah Habba dibentuk menjadi sebuah Kerajaan dengan Raja Pertama Kore Rohi. Kerajaan Seba salah satu kerajaan yang ada di pulau sabu yang memiliki wilayah kekuasaan paling luas meliputi 18 wilayah ketemukungan yakni, (1), Raedewa, (2) Ledean, (3) Teriwu, (4) Raenalulu, (5) Depe, (6) Raemude, (7) Raekore, (8) Raenyale, (9) Nadawawi, (10) Raeloro, (11) Mebba, (12) Menia, (13) Jadu, (14) Ledekapaka, (15) Titinalede, (16) Delo, (17) Roboaba, dan (18) Raemedia. Dia juga mengatakan, pada tahun 1875 didirikan *Ammu Perede Duae* (Istana Pemerintahan Raja), sekaligus sebagai tempat tinggal raja ke XI yaitu Raja Lazarus Rohi. Disitulah pusat pemerintahan Seba dijalankan mulai dari Raja ke XI-XV. Dia juga mengatakan, kerajaan Seba memiliki sistem kerajaan yang sama dengan semua kerajaan pada umumnya. Salah satunya adalah pada saat wafat atau meninggal dunia maka yang berhak melanjutkan tahta dari kerajaan tersebut adalah keturunannya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka disimpulkan bahwa Pemerintahan di Habba dimulia sekitar 1690 dengan

membentuk kerajaan dan mengangkat seorang raja yang menjadi raja Pertama pada kerajaan Seba dengan sistem pemerintahan yang sama dengan semua kerajaan pada umumnya. Nguru Nape (82: Tokoh Masyarakat) mengatakan bahwa kerajaan Seba telah dipimpin oleh beberapa Raja, yaitu: (1) Kore Rohi, (2) Jara Lomi (1694), (3) Wadu Lay (1717-1747), (4) Jara Wadu (1747-1760), (5) Ama Doko Lomi Jara (1761-1790), (6) Doko Lomi (1790-1794), (7) Ama Lomi Jara (1830-1859), (8) Ama Dima Talo (1859-1863), (9) Ama Nia Jawa (1864-1868), (10) Ama Doko Kaho (1868-1881), (11) Lazarus Rohi (1881-1890).

Raja Lazarus Rohi sebagai Raja ke-11 yang memimpin dari tahun 1881-1890. Pada masa pemerintahan Raja Lazarus Rohi masa pemerintahannya sama seperti pemerintahan raja-raja sebelumnya, menjalankan aturan yang di Kerajaan yang sudah ada sebelum masa pemerintahannya. Sesuai perkembangan zaman maka bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Seba dimekarkan menjadi wilayah kecamatan Sabu Barat. Semula wilayah Seba sudah dihuni oleh beberapa suku besar yang memiliki peranan penting, yaitu: suku *Nataga, Namata, Nahoro, Nahupu, Nara'di, Teriwu, dan Kekoro*. Sistem pemerintahan kerajaan semula masih berlangsung hingga 1963.

Keberlangsungan sistem pemerintahan kerajaan bentuk lama secara bertahap diganti dengan sistem pemerintahan desa gaya baru

## **2. Stratifikasi Sosial pada Masa Pemerintahan Raja Lazarus Rohi Tahun 1881-1890**

Sistem sosial dan budaya yang dipercayai sebagai hasil hubungan, komunikasi, sosialisasi individu dalam masyarakat mempunyai pengaruh atas bentuk tatanan lingkungan masyarakat. Akibat dari hubungan, komunikasi dan sosialisasi dalam masyarakat terbagi lapisan-lapisan atau kedudukan berdasarkan kepercayaan, nilai, norma dan adat istiadat dalam masyarakat (Boby Rahman, 2018:195-219). Berikut beberapa Stratifikasi Sosial pada masyarakat Mebba/Seba:

### **a. Sistem Stratifikasi Sosial dalam Masyarakat Mebba/Seba**

Nguru Nape (82: Tokoh Masyarakat) Mengatakan bahwa Sistem Statifikasi di Mebba/Seba berlaku dari masa pemerintahan Raja Ke-3 di Kerajaan Seba sampai Raja Ke-12. Pelapisan sosial yang ada di bagi sesuai dengan struktur Pemerintahan adat yang ada pada saat itu yang di sebut “*Kololoro*” yaitu kelompok-kelompok tertentu yang dihargai dan dihormati daripada orang lain dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan peranan dan statusnya.

#### 1) *Kololoro Duae* (Keturunan Raja)

Dalam golongan ini yang terdiri dari raja-raja dan keturunan dari raja-raja yang memiliki peranan dan fungsi sebagai kepala pemerintahan dan kepala adat dalam sistem pemerintahan adat masyarakat Mebba/Seba.

#### 2) *Kololoro Mone Ama* (Tokoh-tokoh adat)

Merupakan golongan kedua terdiri dari Fetor (*Weto*), Temukung (*Temugu*), tokoh adat (*Mone Ama*) yang memiliki peranannya sebagai tangan kanan Raja yang di dalamnya terdapat para utusan dari seluruh *Udu* yang ada di Seba/Mebba.

#### 3) *Kololoro Ana Rai* (Masyarakat Biasa)

Merupakan golongan bawah yang terdiri dari masyarakat biasa (*Ana Rai*), para pendatang (*D'au Dakka*). Golongan ini disebut sebagai golongan pelaksana dari setiap keputusan dan kebijakan adat dari kedua golongan diatas berdasarkan musyawarah adat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Sabu dibagi dalam kelompok-kelompok tertentu yang dikenal dengan “*Kololoro*” tersebut dianggap sebagai faktor penting yang menguasai sehingga dapat mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan religius masyarakat Sabu. Oleh karena itu masyarakat Sabu pada saat pemerintahan Raja Lazarus Rohi terkenal sebagai

masyarakat yang sangat ketat mempertahankan aturan pelapisan sosial.

Agustina Hae (78: Keturunan *Duae/Raja* ke XV), Mengatakan bahwa stratifikasi sosial di Mebba/Seba berlaku selama masa pemerintahan Raja Ke-11 (Raja Lazarus Rohi) selama satu periode saja, karena pada masa pemerintahannya ada lapisan sosial yang berlaku di Mebba tahun 1881-1890, yakni:

- 1) Statifikasi Sosial dalam adat perkawinan Masyarakat Mebba tahun 1881-1890

Perkawinan di Mebba/Seba pada tahun 1881-1890 harus mengikuti jenjang golongan dan sangat dilarang keras ketika perkawinan terjadi diluar golongan, seperti orang dari golongan *Duae* tidak diperkenankan untuk mengawini seorang lelaki atau perempuan dari golongan *Ana Rai*. Jika kedapatan ada yang melanggar aturan adat yang dikenal dengan *Li Pereda*, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Lebih dari itu jika perkawinan diluar golongan maka masyarakat Mebba/Seba selalu beranggapan bahwa hal itu merupakan dosa besar yang tidak dapat diampuni, yang dapat berakibat kutukan, kematian serta dikeluarkan dari statusnya. Untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan mempertahankan status serta keutamaanya, keturunan raja mencegah saudara/inya agar tidak kawin dengan orang dari tingkatan yang lebih rendah. Jika terjadi

hubungan percintaan antara seorang lelaki dari golongan Mone Ama dan wanita dari golongan Ana Rai, dan keduanya bersepakat untuk menikah (*maho ami*), namun apabila keluarga lelaki tetap mempertahankan derajatnya maka *maho ami* tidak dapat dilaksanakan, jika seorang wanita bersikeras untuk menentang hal itu, maka akibatnya adalah kematian yang didapatkannya. Jika *Maho ami* tetap dilaksanakan karena didesak oleh wanita tersebut hamil diluar nikah kepada keluarganya, maka lelaki tersebut harus menunggu anaknya lahir agar bisa membawa anak dan istrinya untuk tinggal bersama yang disebut dengan *Pe Ami Ngara Ana*. Secara adat anak-anak yang lahir diluar nikah adat belum diakui sah untuk mewarisi hak-hak ada sesuai dengan tingkatan atau golongan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Sabu sejak dahulu telah memberikan posisi yang istimewa dan kedudukan yang strategis terhadap keturunan raja sebagai elite jika dibandingkan dengan keturunan masyarakat biasa dalam struktur sosial yang ada. Keturunan raja tersebut menjadi pemimpin tertinggi dalam struktur politik atau struktur kekuasaan. Sehubungan dengan penempatan posisi keturunan Raja dalam stratifikasi sosial ini, didalam masyarakat Sabu terdapat hubungan yang sangat kompleks antara individu yang satu dengan yang lainnya.

Seperti kita ketahui bahwa pada masa lalu hubungan-hubungan yang paling erat adalah hubungan keturunan raja dan para pengikutnya.

## **B. Pembahasan**

Pembahasan ini menghubungkan hasil penelitian dengan konsep serta teori yang digunakan para ahli. Berkaitan dengan pembahasan hasil penelitian, pada bagian ini akan dijelaskan berdasarkan pendapat peneliti yang berkaitan dengan Sejarah Kerajaan Seba Pada Masa Pemerintahan Raja Lazarus Rohi Tahun 1881-1890.

### **1. Sejarah Kerajaan Seba Pada Masa Pemerintahan Raja Lazarus Rohi Tahun 1881-1890**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerajaan Seba menjalankan roda pemerintahan yang dipimpin oleh raja dan seluruh perangkat raja yaitu, fetor dan temukung yang bertugas membantu raja. Di bawah temukung terdapat masyarakat sebagai pelaku (subjek) dalam pemerintahan. Kerajaan Seba merupakan salah satu kerajaan yang berada di Pulau Sabu yang memiliki wilayah kekuasaan yang paling luas. Kerajaan di perintahkan oleh Raja Lazarus Rohi sebagai Raja ke XI atas wilayah tersebut. Raja adalah gelar penguasa monarki yang paling terkenal dalam bahasa Indonesia. Gelar ini berasal

dari India dan mulai digunakan seiring berkembangnya agama Hindu di Nusantara. Wilayah kekuasaan raja tersebut disebut Kerajaan. Bentuk wanita dari gelar ini adalah ratu. Sejak abad X berkembanglah sebuah paham yang biasa dewa atau raja, yaitu satu paham yang menganggap raja atau penguasa sebagai dewa. Tujuan utama konsep tersebut adalah untuk mendapatkan kepatuhan rakyatnya karena kemudian perintah dan larangan raja identik dengan perintah dan larangan dewa. Dalam menjalankan tugasnya raja wajib berkoordinasi dengan fetor dan temukung dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kerajaan seba adalah wilayah Habba/Seba yang menjadi bagian dari *Dara Rai* anak dari *Waka Wai* generasi ke-18 dari *Kika Ga*. Sebelum menjadi kerajaan dan diperintah oleh raja, wilayah Habba/Seba diperintah oleh beberapa kelompok adat yang disebut “Dewan Mone Ama” yakni 9 Dewan adat: (1) Deo Rai, (2) Pulo'do, (3) Doheleo, (4) Rue, (5) Latia, (6) Bakka-Pahi, (7) Maukia, (8) Kenuhe, dan (9) Tutudalu.

Ali (2005:12) menyatakan bahwa di dalam ilmu sejarah terdapat tiga bentuk pandangan (1) jumlah perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa-peristiwa

dalam kenyataan sekitar manusia, (2) cerita tentang perubahan itu dan sebagainya, (3) ilmu yang bertugas menyelidiki tentang perubahan dan sebagainya serta ilmu yang menyelidiki perubahan-perubahan tersebut itu pada dasarnya merupakan kegiatan manusia. Sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai cerita adalah ciptaan manusia dan bukan sesuatu yang timbul atau terjadi di luar usaha manusia. Manusia sebagai subjek atau pemegang peran dalam membuat ilmu sejarah serta subyek, artinya hasil perbuatan manusia.

Namun untuk memudahkan pelaksanaan pemerintah di wilayah Habba maka sekitar tahun 1690 dibentuklah kerajaan dan dihuni oleh tujuh suku besar yang berperan penting, yaitu: Suku Nataga, Namata, Nahoro, Nahupu, Nara'di, Teriwu, dan Kekoro.

Kansil (2008:23) mengatakan bahwa perjalanan suatu kerajaan tidak terlepas dari situasi intern dan ekstern dari kerajaan tersebut. Situasi keamanan dan ketertiban dalam suatu kerajaan tergantung pada partisipasi dari berbagai pihak termasuk semua warga yang berada dalam kerajaan. Luas atau sempitnya kerajaan tidaklah menjadi persoalan yang terpenting adalah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti adanya kekuasaan, rakyat yang mendiami

wilayah tersebut adanya kekuasaan pemerintah yang berdaulat.

Pengertian di atas mengindikasikan bahwa pada dasarnya sejarah memiliki aspek-aspek yang saling berhubungan antara satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Hal ini sejalan dengan terbentuknya Kerajaan Seba. Kerajaan ini berdiri tidak terlepas dari perubahan yang terjadi dari hubungan manusia yang kemudian menghadirkan cerita sejarah yang ada di masa lampau yang berdampak pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

## **2. Stratifikasi Sosial pada Masa Pemerintahan Raja Lazarus Rohi Tahun 1881-1890**

Stratifikasi sosial pada masa pemerintahan Raja Lazarus Rohi sangat ketat dan masyarakat Mebba patuh terhadap aturan yang berlaku. Stratifikasi Sosial adalah selama terdapat sesuatu yang dihargai maka dengan sendirinya pelapisan sosial tersebut terjadi (Soemardjan & Soemardi, 1974).

### **a. Sistem Stratifikasi Sosial dalam masyarakat Mebba/Seba**

Pitirin Sorokin menyatakan bahwa *Social Stratification* adalah penduduk kedalam kelas-kelas secara bertingkat

(secara hierarkhis). Perwujudannya adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah. Menurut Sorokin, dasar dan inti dari lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan tanggungjawab nilai-nilai sosial dan pengaruhannya diantara anggota masyarakat (Binti Maunah, 2015:19-38). Lebih lanjut Burhan Bungin menyatakan strata sosial sosial di masyarakat melahirkan kelas-kelas sosial yang terdiri dari tiga tingkatan, yaitu atas (*Upper Class*, menengah (*Middle Class*), dan bawah (*Lower Class*). Kelas atas ialah kelompok elit di masyarakat yang jumlahnya sangat terbatas. Kelas menengah mewakili kelompok profesional, sedangkan kelas bawah mewakili kelompok pekerja keras. Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat Sabu juga dibagi dalam kelas-kelas secara bertingkat.

Masyarakat Mebba/Seba menyadari akan adanya sistem stratifikasi sosial yang disebut "*Kololoro*" yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat setempat, karena kenyataannya peranan, fungsi dan status masyarakat Mebba berdasarkan struktur pemerintahan adat yang telah diatur, maka setiap *Kololoro* atau keturunan mempunyai peranan dan fungsi masing-

masing, dapat dilihat bahwa keturunan raja mempunyai status, peranan dan fungsinya lebih tinggi dari dua keturunan masyarakat yang ada yaitu *Kololoro Mone Ama*, dan *Kololoro Ana Rai*. Hal ini merupakan suatu perbedaan yang akurat diantara masyarakat Mebba/Seba secara utuh, sangat nampak pada pelaksanaan adat perkawinan dan sistem pemerintahan adat pada masyarakat Mebba/Seba.

a. Stratifikasi Sosial dalam Adat Perkawinan Masyarakat Mebba/Seba

Perkawinan bertujuan untuk mencapai suatu tingkat kehidupan yang lebih dewasa dan pada beberapa kelompok masyarakat kesukuan perkawinan dianggap sebagai alat agar seorang mendapat status yang lebih diakui ditengah kelompoknya (Syarifuddin, 2017:1-4). Berdasarkan penelitian dapat dikatakan bahwa adat perkawinan di Pulau Sabu, suatu perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang terjadi antara mereka yang mempunyai strata sosial yang sama atau derajat atau golongan yang sama. Hal ini merupakan warisan budaya daerah yang memiliki kecenderungan dikalangan golongan teratas yakni *Kololoro Duae* untuk mempertahankan kemurnian darah dan keturunan adat perkawinan. Hal ini sejalan dengan pandangan Ter Haar, bahwa perkawinan menurut hukum adat adalah

urusan kerabat, urusan derajat dan urusan pribadi satu sama lain dan hubungannya yang sangat berbeda-beda. Masyarakat hukum adat memandang bahwa perkawinan untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan (Nuria, 2019:119).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang terjadi antara mereka yang setingkat status sosialnya, namun bukan tidak pernah terjadi perkawinan campuran antara perkawinan seorang dari golongan teratas dengan seorang dari golongan menengah atau golongan paling rendah, dalam hal perkawinan dimana seorang dari golongan teratas kawin dengan wanita dari golongan menengah atau paling rendah, maka anak-anaknya yang lahir harus angkat statusnya mengikuti status ayahnya. Karena perkawinan adat di Pulau Sabu bukan sekedar untuk menyatukan dua pribadi yang berjanji secara adat tetapi mempersatukan dua keluarga besar antara keluarga ayah dan keluarga ibu dari kedua mempelai dan menghasilkan kesepakatan perkawinan adat diantara kedua mempelai.

Penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum adat dapat dilakukan melalui musyawarah. Para pemuka adat menjalankan fungsinya sebagai mediator,

fasilitator, negosiator, dan arbiter. Dalam praktiknya para tokoh adat umumnya menggunakan pendekatan ini secara bersama-sama, terutama dalam penyelesaian privat maupun publik. Penyelesaian ini ditempuh oleh para pihak yang berkonflik adalah penyelesaian secara kekeluargaan dengan mediasi guna mencari jalan keluar yang terbaik untuk itu diperlukan peran pemuka adat yang bertindak sebagai mediator.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang sejarah Kerajaan Seba Pada Masa Pemerintahan Raja Lazarus Rohi 1881-1890, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Kerajaan Seba merupakan salah satu kerajaan yang pernah ada di wilayah Kabupaten Sabu Raijua dengan wilayah kekuasaan paling luas. Sistem pemerintahan ini terus bertahan hingga 1963. Kerajaan Seba awalnya bukanlah sebuah Kerajaan karena pada saat itu terjadi pembagian wilayah pada masa *Wai Waka* (generasi ke-18 dari *Kika Ga* dan generasi ke-13 dari *Ngara Rai*. Pembagian tersebut yakni, (1) *Dara Rai* mendapat wilayah Habba (Seba)

yang menjadi Kerajaan Seba, (2) *Wara Wai* mendapat wilayah Liae, (3) *Laki Wai* mendapat wilayah Dimu (Timur), (4) *Kole Wai* mendapat wilayah Mehara (mesara), (5) *Di'da Wai* mendapat wilayah Menia, dan (6) *Jaka Wai* mendapat wilayah Raijua. Sebelum wilayah Habba di bentuk menjadi kerajaan dan diperintah oleh raja, wilayah Habba diperintah oleh beberapa kelompok adat yang disebut “Dewan *Mone Ama*”. Untuk mempermudah pelaksana pemerintahan di wilayah Habba maka sekitar tahun 1690 wilayah Habba dibentuk menjadi kerajaan Seba dengan raja pertama Kore Rohi. Pada tanggal 20 Desember 1890 terjadi lagi pembagian wilayah Seba, Mesara, Timur Dan Liae.

Stratifikasi Sosial pada masa pemerintahan Raja Lazarus Rohi sangat ketat dan masyarakat Mebba patuh terhadap aturan yang berlaku. Masyarakat Mebba/Seba menyadari akan adanya sistem stratifikasi sosial yang disebut “*Kololoro*” yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat setempat, karena kenyataannya peranan, fungsi dan status masyarakat Mebba berdasarkan struktur pemerintahan adat yang telah diatur, maka setiap *Kololoro* atau keturunan mempunyai peranan dan fungsi masing-masing, dapat dilihat bahwa keturunan raja mempunyai status, peranan

dan fungsinya lebih tinggi dari dua keturunan masyarakat yang ada yaitu *Kololoro Mone Ama*, dan *Kololoro Ana Rai*. Hal ini merupakan suatu perbedaan yang akurat diantara masyarakat Mebba/Seba secara utuh, sangat nampak pada pelaksanaan adat perkawinan pada masyarakat Mebba/Seba.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulgani, Roeslan. 1963. *Penggunaan Ilmu Sejarah*. Djakarta. Prapanca.
- Adji, Oktaviana Riwu. 2021. *Sejarah Kerajaan Seba Pada Masa Pemerintahan Raja Samuel Thomas Jawa Tahun 1907-1915*. Kupang. Skripsi Program Studi Sejarah FKIP Undana.
- Aji, R. H. S. 2015. *Stratifikasi Sosial dan Kesadaran Kelas*. Salam: *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-1*, 2(1). 34-37.
- Ali, R. Moh. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta LK S.
- Basri, MS. 2006. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Restu Agung.
- Busroh, H. A. D. 1989. *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Doko, I.H. 1981. *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Di Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Balai Pustaka
- Effendy, Onong Uchjana. 1981. *Dimensi-dimensi Komunikasi*. Bandung: PT. Alumni.

- Hamid, Abd Rahman dan Muhammad Saleh Madjid. 2018. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Iskandar. 2008. *Meodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press.
- Kansil, C.S.T. 2008. *Pemerintahan Daerah di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaho, Robert Riwu. 2005. *Orang Sabu da Budayanya*. Jogja Global Media. Yogyakarta
- Kartodirjo, Kartono. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama
- Koentjaraningrat, 1975. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Sapsodan
- Kuntowijoyo. 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar ilmu sejarah Indonesia*. Yogyakarta : Bentang
- Mansur, M. dkk. (2013). *Otoritas dan Legitimasi Kedudukan Pemimpin Tradisional di Loloda Maluku-Utara 1808-1958*. *Sosiohumaniora*, 15(1), 64-72.
- Margono, S. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mata, Irna Malinda Susanti Wadu. 2023. *Sejarah Kerajaan Seba pada Masa Pemerintahan Raja Elias Ludji Radja Pono Tahun 1901-1906*. Kupang. Skripsi Program Studi Sejarah FKIP Undana.
- Maunah, B. (2015). *Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan*. Ta'allum: *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 19-38.
- Parera, A. D.M. 1994. *Sejarah Pemerintahan Raja-Raja Timor*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Rahman, B. dkk. (2018). *Studi Literatur: Peran stratifikasi Sosisal Masyarakat Dalam Pembentukan Pola Permukiman*. *Jurnal Planologi*, 15(2),195-215.
- Septiana, Nuria Reny Hariyati, Hespi. (2019). *Buku Ajar Membaca Kritis: Radikalisme Dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis*. Penerbit Graniti.
- Singgih, D. S. 2017. *Prosedur Analisis Stratifikasi Sosial dalam Perspektif Sosiologi*. *Universitas Airlangga*, 3(11), 1-10.
- Stonner James, A.F. Dkk. 1996. *Manajemen*. Edisi Indonesia. PT. Prenhallindo. Jakarta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suprpto. 2013. *Metode Penelitian Ilmu pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Buku Seru.
- Soemardjan, & Soemardi, S. 1976. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Soekanto, Soerjono dan Silistyowati, Budi. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin, S. (2017). *Stratifikasi Sosial dalam Budaya A'matoang Masyarakat Turatea Kabupaten Jeneponto*. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 5(1).
- Tamburaka, H. R. E. 2002. *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah. Sejarah Filsafat Dan Iptek*. Jakarta: Rineka Cipta

Wahjosumidjo. 1999. *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*. Rajagrafindo Persada (Rajawali Pers). Jakarta

Widiyatmika, Munanjar, dkk. 1978. *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Timur*. PN Balai Pustaka. Jakarta

Widiyatmika, Munanjar. 2007. *Lintasan Sejarah Bumi Cendana*. Kupang. Pusat Pengembangan Madrasah NTT.

Widiyatmika, Munanjar. 2008. *Kebudayaan Masyarakat Di Bumi Cendana*. Kupang. Pusat pengembangan Madrasah NTT